



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN

KPKNL
BANDA ACEH

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan
Lelang Banda Aceh

2025

PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selaras dengan semangat yang diusung pada tahun 2025 untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan dari pengguna layanan, kami menyusun laporan ini sebagai refleksi atas komitmen kami untuk terus melayani lebih baik. Melalui pelatihan, inovasi, dan evaluasi berkelanjutan, kami berupaya meningkatkan setiap aspek pelayanan yang diberikan sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah berhasil menyelesaikan seluruh rencana kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan baik. Tentunya, keseluruhan capaian kinerja tahun 2025 ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh insan KPKNL Banda Aceh, dengan semangat dan dedikasi yang lebih membara dari tahun sebelumnya, telah bekerja keras menyelesaikan Perjanjian Kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Terucap puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, KPKNL Banda Aceh kembali menyusun dan melaporkan seluruh capaian kinerja dimaksud melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban KPKNL Banda Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Banda Aceh selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini bukan hanya sekedar rangkaian angka dan statistik, namun sebuah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Banda Aceh atas penggunaan anggaran selama tahun 2025, serta cerminan dari upaya kolektif untuk menciptakan pelayanan terbaik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka sebagai instansi pemerintah, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan realisasi IKU Kemenkeu-Wide Tahun 2025 yang di-*cascade* secara langsung maupun tidak langsung, dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja KPKNL Banda Aceh. Rata-rata capaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 112,27% dari 8 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU. Secara keseluruhan IKU yang dicapai pada tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan.

Harapannya, LAKIN KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban KPKNL Banda Aceh serta upaya meningkatkan kualitas layanan Pengelolaan Kekayaan Negara,

Piutang Negara, dan Lelang untuk menjawab semakin tingginya harapan masyarakat atas kinerja dan pelayanan birokrasi.

Akhir kata, kepada seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh, diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya dalam mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami membuka diri atas segala saran dan kritik dari seluruh *stakeholder* sebagai salah satu langkah kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Februari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Meynar Dwi Anggraeny

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KPKNL Banda Aceh sebagai ujung tombak pelayanan di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjadikan laporan kinerja sebagai alat kontrol, alat pengukuran kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan alat pemacu dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPKNL Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis DJKN 2025-2029, di mana terdapat 4 (empat) tujuan pokok dalam kerangka pembangunan rencana strategis DJKN tahun 2025-2029 yakni Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial; Layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan; Layanan lelang yang modern dan terpercaya; dan Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Berdasarkan strategi-strategi yang termaktub dalam Rencana Strategis, KPKNL Banda Aceh menyusun Perjanjian Kinerja yang di dalamnya memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut menjadi alat kontrol kuantitatif dalam pengukuran berhasil atau tidaknya KPKNL Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Banda Aceh telah menorehkan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif melalui penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihasilkan berdasarkan capaian IKU, yaitu sebagai berikut:

- a) Indeks Integritas dengan realisasi sebesar 105,32% dari target 100%;
- b) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan realisasi sebesar 100,46% dari target 100%;
- c) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara dengan realisasi sebesar 100,45% dari target 100%;
- d) Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan realisasi sebesar 86,79% dari target 100%;
- e) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara dengan realisasi sebesar 144,81% dari target 100%;

- f) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan pencapaian 95,15 dari target 77;
- g) Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi dengan pencapaian 99,21 dari target 74;
- h) Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan realisasi sebesar 135,42% dari target 100%;
- i) Persentase Evaluasi Kinerja BMN dengan realisasi sebesar 115,57% dari target 100%;
- j) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara dengan realisasi 133% dari target 100%;
- k) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian dengan realisasi sebesar 108,27% dari target 70%;
- l) Persentase Produktivitas Lelang dengan realisasi sebesar 109,37% dari target 80%;
- m) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dengan pencapaian 120 dari target 100;
- n) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan pencapaian 120 dari target 100;
- o) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan realisasi sebesar 98% dari target 80%;
- p) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum dengan pencapaian 118,01 dari target 100;
- q) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) dengan pencapaian 115,75 dari target 80;
- r) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko dengan pencapaian 99,53 dari target 80;
- s) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100% dari target 95,3%;
- t) Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM dengan pencapaian 120 dari target 100.

Dari berbagai capaian tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Banda Aceh tahun 2025 mencapai **112,27%**. Dengan demikian, secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan beberapa IKU tercapai melebihi target kecuali pada IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang yang mencapai nilai 86,79% dari target maksimal 100%. Pencapaian NKO dengan predikat Istimewa tersebut juga didukung dengan peningkatan pelayanan yang diberikan KPKNL Banda Aceh, yang tercermin dari survei kepuasan pengguna layanan dengan menggunakan media digital (e-SKPL) Triwulan IV Tahun 2025 yang sangat baik, dengan capaian indeks kepuasan sebesar 4,97 (skala 5).

KPKNL Banda Aceh sebagai kantor yang terus melakukan perbaikan tentunya tidak berpuas diri dengan hasil yang telah diraih, namun terus mendorong seluruh pegawai agar semakin antusias dan bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kinerja yang optimal, inovasi yang aplikatif, dan ide-ide terbaik di tahun 2026 dan seterusnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	1
C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Banda Aceh	5
D. Sistematika Laporan	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 dan Perbandingannya	18
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja	27
3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target	34
4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan	35
6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi	37
7. Rencana Aksi	38
B. Kinerja Lainnya	38
C. Realisasi Anggaran	39
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	3
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	4
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	4
Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	4
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.01/2025	13
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.01/2026	16
Tabel 3.1 Capaian IKU Pada SS - Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya	18
Tabel 3. 2 Capaian IKU pada SS - Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal	19
Tabel 3. 3 Capaian IKU Pada SS - Pelayanan Kekayan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	20
Tabel 3. 4 Capaian IKU Pada SS - Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif	20
Tabel 3. 5 Capaian IKU Pada SS - Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif	21
Tabel 3. 6 Capaian IKU Pada SS - Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif	21
Tabel 3. 7 Capaian IKU Pada SS - Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif	22
Tabel 3. 8 Capaian Iku Pada SS - Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif	23
Tabel 3. 9 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025.....	23
Tabel 3. 10 Capaian KPKNL Banda Aceh Tahun 2021-2025 (5 tahun terakhir).....	25
Tabel 3. 11 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	40
Tabel 3. 12 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2025.....	40
Tabel 3. 13 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2025.....	41
Tabel 3. 14 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.....	41
Tabel 3. 15 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.....	41
Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Banda Aceh	3
Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh	12
Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan IKPA Tahun 2025.....	38



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Banda Aceh
- D. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah diubah menjadi Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu rangkaian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan untuk mencapai akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2025, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang berisi rincian target dan kegiatan serta realisasi yang telah dicapai KPKNL Banda Aceh dari bulan Januari hingga Desember tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi DJKN meliputi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang kekayaan di negara, penilaian, dan lelang;

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e) Pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas

Dalam kaitan ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh, memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang di wilayah kerja KPKNL Banda Aceh.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b) Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi piutang negara;
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Banda Aceh dengan jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor) dibantu oleh 4 (empat) eselon IV.a (Kepala Seksi/Kasubbag Umum) dan 1 (satu) Plt. Kepala Seksi, serta kelompok jabatan fungsional. Secara spesifik, unit kerja pada KPKNL Banda Aceh terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan

Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Banda Aceh



Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2025, KPKNL Banda Aceh didukung oleh 31 Pegawai PNS dan 10 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*, komposisi pegawai PNS pada KPKNL Banda Aceh dapat dipetakan berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, dan golongan.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
18-30	13
31-40	10
41-50	6
>50	2
Jumlah	31

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
D1	2
D3	9
S1	11
S2	7
SMA	2
Jumlah	31

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	17
Perempuan	14
Jumlah	31

Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
II	-	2	3	4	9
III	4	9	4	1	18
IV	4	-	-	-	4
Jumlah	8	11	7	5	31

Wilayah Kerja KPKNL Banda Aceh

KPKNL Banda Aceh memiliki wilayah kerja yang luas meliputi 13 kota dan/atau kabupaten, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Adapun kota dan kabupaten yang termasuk wilayah kerja KPKNL Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a) Kota Banda Aceh;
- b) Kota Sabang;
- c) Kab. Aceh Besar;
- d) Kab. Aceh Jaya;
- e) Kab. Pidie;
- f) Kab. Pidie Jaya;
- g) Kab. Aceh Barat;
- h) Kab. Nagan Raya;
- i) Kab. Aceh Barat Daya;
- j) Kab. Aceh Selatan;
- k) Kota Subulussalam;
- l) Kab. Aceh Singkil;
- m) Kab. Simeulue.

C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Banda Aceh

Pada tingkat teknis, KPKNL Banda Aceh sebagai instansi vertikal DJKN yang diberikan mandat untuk mengelola barang milik negara telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

- a) Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
- b) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan ekonomi dan keadilan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tersebut di atas, terdapat peran strategis yang harus ditempuh, yaitu:

- a) Membuat usulan atas peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b) Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, lelang dengan akurat dan akuntabel;
- c) Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- e) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara;
- f) Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- g) Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- h) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- i) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Isu-Isu Strategis (Keunggulan, Tantangan, dan Permasalahan)

- a) Dalam 5 (lima) tahun terakhir DJKN sebagai manajer aset telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa pengembangan organisasi modern pengelola kekayaan negara yang semakin berorientasi pada pengguna layanan melalui dukungan teknologi informasi yang terus disempurnakan. Sejalan dengan “Cetak Biro Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025”, menandai komitmen DJKN dalam meningkatkan pengelolaan yang lebih baik seiring tuntutan kekinian dalam era transformasi digital (digitalisasi). Digitalisasi merupakan upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dalam setiap tahapan manajemen aset dan investasi melalui pembangunan sistem yang andal dan terintegrasi, sehingga permohonan layanan oleh pengguna layanan kepada DJKN dapat dengan cepat ditindaklanjuti. Sebagai organisasi yang adaptif dan dalam rangka menunjang *continues improvement*, KPKNL Banda Aceh telah mengimplementasikan digitalisasi proses layanan diantaranya layanan lelang melalui portal lelang.go.id dan layanan pengelolaan kekayaan negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.
- b) Pada Tahun 2025 terdapat prestasi yang diukir oleh KPKNL Banda Aceh, diantaranya mendapatkan Nilai IKPA Sempurna (Nilai 100) pada Semester I TA 2025 dan Triwulan III TA 2025.
- c) KPKNL Banda Aceh memiliki sumber daya manusia yang unggul dan aktif sehingga terdapat 1 (satu) orang pegawai KPKNL Banda Aceh yang sedang menempuh pendidikan yaitu dalam program Master pada Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
- d) Pencapaian yang luar biasa dari KPKNL Banda Aceh Adalah capaian penurunan nilai saldo piutang negara yang mencapai 144,81%, yakni dari target Rp720.000.000,00 berhasil tercapai penurunan saldo sebesar Rp1.042.638.672,46. KPKNL Banda Aceh juga mencatat capaian Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan dengan realisasi sebesar 135,42% dari target 100%;
- e) Persentase produktivitas lelang KPKNL Banda Aceh berhasil tercapai sebesar 109,37%. Meningkatnya frekuensi lelang ini berdampak positif dengan peningkatan PNBPN akan tetapi juga berbanding lurus dengan peningkatan gugatan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang, baik dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ataupun non TGR.

- f) Dalam hal pengurusan piutang negara, terdapat tantangan meliputi Debitor yang sering tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitor tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN).
- g) Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan penilaian, beberapa tantangan dan permasalahan dapat diidentifikasi seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi yang masih memerlukan penyempurnaan fitur, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah.
- h) Selanjutnya, terdapat IKU yang meskipun tercapai namun memiliki tantangan tersendiri untuk menggapai keberhasilan seperti IKU PNBPN atas pengelolaan kekayaan negara. Kondisi sebelumnya yaitu terdapat Satuan Kerja (Satker) Universitas Syah Kuala yang menjadi salah satu Satker penyumbang PNBPN yang paling signifikan, namun saat ini Satker tersebut telah berubah status menjadi PTNBH, sehingga atas pengelolaan aset Satker dimaksud tidak lagi diakui sebagai capaian IKU PNBPN KPKNL Banda Aceh.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 ini terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif
Bagian ini menguraikan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan yang ingin dicapai pada tahun 2026.
2. Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
 - B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Menguraikan penjelasan organisasi meliputi tugas, fungsi dan struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus.
 - C. Mandat dan Isu Strategis
Sub bab ini menyajikan mandat KPKNL Banda Aceh serta permasalahan (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja
 - A. Perencanaan Strategis
Menguraikan ikhtisar perencanaan strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Pada sub bab ini dijelaskan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025.
 - C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Pada sub bab ini dijelaskan proses penyusunan PK tahun 2026, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum dalam Renstra.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - c. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025
 3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
 9. Rencana Aksi ke depan.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV Penutup
6. LAMPIRAN



02.

Rencana Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dokumen perencanaan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2015 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to A Distinguished Asset Manager*). Pada dokumen Renstra yang telah ditetapkan tersebut, tercantum rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJKN demi tercapainya pelayanan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab.

Visi

Formulasi visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu:

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tujuan

Guna menjabarkan atau mengimplementasikan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka DJKN menetapkan 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai. Dalam kaitan ini, KPKNL yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang juga memiliki tujuan yang berkorelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Adapun tujuan KPKNL Banda Aceh selaras dengan tujuan DJKN sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Sasaran

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kemudian menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan DJKN yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif

Beranjak dari sasaran sebagaimana tersebut di atas, sasaran yang ingin dicapai oleh KPKNL Banda Aceh dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara;
 - b. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran;

- c. Terwujudnya informasi nilai terkini dan nilai potensial kekayaan negara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Seksi Piutang Negara
 - a. Terwujudnya pengurusan piutang negara secara sehat dan bersih;
 - b. Tercapainya target piutang negara yang dapat diselesaikan;
 - c. Terwujudnya pengelolaan dokumen asli barang jaminan.
3. Seksi Hukum dan Informasi
 - a. Tercapainya peningkatan penatausahaan BKPN dan penyajian informasi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang dan lelang;
 - b. Tercapainya optimalisasi penanganan perkara.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.
4. Seksi Kepatuhan Internal
 - a. Pelaksanaan SOP Unggulan tepat waktu;
 - b. Penyusunan kontrak kinerja yang tepat waktu dan mencerminkan capaian kinerja masing-masing pegawai dan organisasi;
 - c. Mendefinisikan risiko yang mungkin terjadi beserta langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah;
 - d. Memastikan kode etik dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku dijalankan oleh seluruh pegawai;
 - e. Memastikan hasil pemeriksaan aparat fungsional ditindaklanjuti;
 - f. Laporan hasil pelaksanaan SOP Layanan Unggulan yang andal dan akurat.
5. Subbagian Umum
 - a. Terlaksananya pemberian dukungan teknis dan administrasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - b. Pelaksanaan DIPA yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional kantor.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang
 - a. Terselenggaranya pelayanan lelang yang modern, bersih, transparan dan akuntabel;
 - b. Tercapainya target hasil lelang baik dari pokok lelang maupun bea lelang;
 - c. Tercapainya lelang yang produktif.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai
 - a. Administrasi Seksi Pelayanan Penilaian yang tertib dan berkualitas;
 - b. SDM Penilai yang handal;
 - c. Pelayanan penilaian dalam rangka utilisasi BMN yang optimal;

- d. Pelayanan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara yang optimal;
- e. Tersedianya harga pasar yang wajar dalam rangka penyusunan DKPB.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Proses penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menyelaraskan antara manajemen kinerja dengan dokumen perencanaan strategis organisasi, baik berupa Renstra Kementerian Keuangan maupun Renstra DJKN. Selain itu dilakukan pula penyelarasan antara manajemen kinerja dengan manajemen SDM dan organisasi, dimana sasaran strategis, IKU, dan target organisasi diturunkan hingga ke level individu melalui proses *cascading*. Hasil penilaian kinerja kemudian digunakan untuk penataan SDM Kementerian Keuangan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan target organisasi sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis DJKN 2020-2024 secara optimal dan tepat waktu, kemudian dirumuskan peta strategi DJKN, yang menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dalam perjanjian kinerja tahun 2025, KPKNL Banda Aceh telah menetapkan Peta Strategi sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPKNL Banda Aceh Tahun 2025



Dari Peta Strategi KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang selanjutnya tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Bersamaan dengan telah ditetapkannya Peta Strategi, KPKNL Banda Aceh menetapkan perjanjian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.01/2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.01/2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp20,5 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp76,5 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp 720 Jt)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95.3%
		8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali merumuskan Rencana Strategis melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra terbaru yang telah ditetapkan tersebut memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJKN yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN. Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN Tahun 2025-2029 dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun

tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

Visi

Formulasi visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 yaitu:

Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN melalui Renstra Tahun 2025-2029 menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Tujuan

Visi dan Misi DJKN selanjutnya diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Tujuan DJKN dimana setiap Tujuan memiliki rumusan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh DJKN. Keempat Tujuan tersebut meliputi:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan

4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dokumen Renstra DJKN Tahun 2025-2029 kemudian menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Organisasi seluruh unit di lingkungan DJKN, termasuk KPKNL Banda Aceh, sehingga rumusan Visi DJKN menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan dapat tercapai. Dalam kaitan ini, KPKNL Banda Aceh telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selaras dengan perencanaan strategis tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Nomor PK-01/WKN.01/2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,7 M)
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-CP Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp120 Jt)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp37 M)
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Dari Perjanjian Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2026 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU, yang dalam hal ini menggambarkan berbagai hal strategis yang ingin dicapai dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang di lingkup KPKNL Banda Aceh.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan disampaikan mengenai capaian kinerja KPKNL Banda Aceh sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan paparan perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja pada tahun 2025, serta capaian kinerja KPKNL Banda Aceh dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019) sebagai referensi realisasi dan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Bab ini juga akan dijelaskan mengenai keberhasilan, hambatan, upaya *extra effort* dalam rangka pencapaian target kinerja, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh agar dapat menjadi masukan pada tahun berikutnya. Kemudian turut diuraikan mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan mandat serta tugas KPKNL Banda Aceh dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian dan lelang, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Strategis DJKN telah dilaksanakan dengan penuh integritas dan akuntabel. Hal tersebut tercermin melalui capaian kinerja organisasi yang diukur dengan membandingkan data antara target dan realisasi dan disajikan dalam bentuk persentase. Capaian ini dapat menunjukkan seberapa jauh proses atau kemajuan yang telah didapat dalam periode waktu tertentu.

1. Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 dan Perbandingannya

Perbandingan target awal tahun 2025 dan realisasi capaian IKU sesuai perjanjian kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2025 dapat dilihat secara spesifik untuk setiap sasaran strategis pada tabel pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU Pada SS - Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya

Sasaran Strategis 1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

K-Wide	1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	105,32	105,32	

K-One	1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	203,47%	131,25%	131,25%	115,05%	115,05%	100,46%	100,46%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	115,05	115,05	100,46	100,46	

Tabel 3. 2 Capaian IKU Pada SS - Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal

Sasaran Strategis 2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

K-Wide	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	116,67%	74,73%	74,73%	82,12%	82,12%	100,45%	100,45%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	102,65	102,65	100,45	100,45	

K-One	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	124,83%	104,49%	104,49%	100,61%	100,61%	86,79%	86,79%	
Capaian Nilai Kinerja	120	104,49	104,49	100,61	100,61	86,79	86,79	

K-One	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	419,93%	265,31%	265,31%	149,84%	149,84%	144,81%	144,81%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 3 Capaian IKU Pada SS - Pelayanan Kekayan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Sasaran Strategis 3 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

K-Three	3 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max / TLK
Realisasi	90,80	91,60	91,60	93,73	93,73	95,15	95,15	
Capaian Nilai Kinerja	117,92	118,96	118,96	120	120	120	120	

K-Two	3 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max / TLK
Realisasi	105	97,85	97,85	100,28	100,28	99,21	99,21	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 4 Capaian IKU Pada SS - Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Sasaran Strategis 4 - Penerapan tata kelola aset yang efektif

K-One	4 - Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	22,25%	88,64%	88,64%	121,12%	121,12%	135,42%	135,42%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Two	4 - Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	19,63%	86,35%	86,35%	97,96%	97,96%	115,57%	115,57%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	115,57	115,57	

Tabel 3. 5 Capaian IKU Pada SS - Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Sasaran Strategis 5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

K-One	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	220%	146,67%	146,67%	110%	110%	133%	133%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	110	110	120	120	

K-One	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max / TLK
Realisasi	105,33%	107,92%	107,92%	107,93%	107,93%	108,27%	108,27%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-One	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	58,63%	68,43%	68,43%	90,11%	90,11%	109,37%	109,37%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 6 Capaian IKU Pada SS - Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

Sasaran Strategis 6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

K-Wide	6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	

Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

K-Three	6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Three	6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	42,74%	59,71%	59,71%	86%	86%	98%	98%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 7 Capaian IKU Pada SS - Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Sasaran Strategis 7 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

K-Two	7 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	114,44	115,03	115,03	117,86	117,86	118,01	118,01	
Capaian Nilai Kinerja	114,44	115,03	115,03	117,86	117,86	118,01	118,01	

K-Three	7 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	115	115,50	115,50	115,67	115,67	115,75	115,75	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 8 Capaian IKU Pada SS - Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif

Sasaran Strategis 8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

K-Three	8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max / TLK
Realisasi	99,91	99,63	99,63	99,79	99,79	99,53	99,53	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

K-Three	8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75,50%	82,50%	82,50%	89,75%	89,75%	95,30%	95,30%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	111,42	111,42	104,93	104,93	

K-Three	8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Selanjutnya, berikut ini merupakan perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja dengan dilengkapi nilai kinerja KPKNL Banda Aceh tahun 2025 yang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Banda Aceh Tahun 2025

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh
Tahun : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stakeholder Perspective (30%)						
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks Integritas	100	105,32	105,32	105,32
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang	100%	100,46%	100,46	100,46
Customer Perspective (20%)						
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100,45%	100,45	100,45
		2b-CP Persentase realisasi pokok Lelang	100%	86,79%	86,79	86,79
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	144,81%	144,81	120
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,15	123,57	120
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	99,21	134,07	120
Internal Process Perspective (25%)						
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	135,42%	135,42	120
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	115,57%	115,57	115,57
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	133%	133	120
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	108,27%	154,66	120
		5c-CP Persentase produktivitas Lelang	80%	109,37%	136,71	120
Learning and Growth Perspective (25%)						
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120	120
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	120	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100	118,01	118,01	118,01
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	115,75	144,69	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99,53	124,41	120
		8b-N	95,30%	100%	104,93	104,93

manajemen risiko yang efektif	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				
	8c-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120	120
NKO					112,27

Sebagaimana ditunjukkan pada serangkaian tabel di atas, telah terdapat proses *alignment* antara Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 dengan Peta Strategi dan Perjanjian Kinerja KPKNL Banda Aceh. Selanjutnya, untuk mengukur performa kinerja KPKNL Banda Aceh dari tahun ke tahun, disajikan perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2021 s.d. 2025). Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kurun waktu lima tahun terakhir tentu tidak sama persis dengan IKU di tahun 2025, sehingga tidak seluruh IKU dapat diperbandingkan setiap tahun. Berikut ini merupakan perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja KPKNL Banda Aceh dari tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3. 10 Capaian KPKNL Banda Aceh Tahun 2021-2025 (5 tahun terakhir)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi				
			2021	2023	2023	2024	2025
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial						
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	57%	60%	65%	70%	100%
			70,61%	71,65%	68,83%	72,49%	100,45%
		Implementasi evaluasi kinerja berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%
			100,00%	111,98%	120%	196%	115,57%
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%
			101,32%	105,66%	121%	102,48%	135,42%
			100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase realisasi penerimaan negara	127,20%	194%	116%	113%	100,46%
		Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	100%	100%	-	100%
			121,95%	100%	103%	-	133%
2.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya						
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%
			120,35%	379,58%	98,43%	60,23%	86,79%
		Persentase produktivitas lelang	34%	34%	80%	80%	80%
			48,84%	49,03%	122,00%	108,73%	109,37%
3.	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien						
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	29%	28%	25%	25%	-
			0,00%	0,04%	0,1%	0,12%	-
4.	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien						
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00	4,00	-	-	77
			4,81	4,82	-	-	95,15
		Persentase kualitas anggaran	95%	95%	100%	95%	100%
			96,61%	97,54%	117%	120%	120%
		Persentase tindak lanjut	75%	75%	86%	80%	80%

Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	persetujuan pengelolaan aset	85,86%	91,09%	88%	92,19%	94,59%
--	------------------------------	--------	--------	-----	--------	--------

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Dari evaluasi kinerja terhadap IKU KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJKN Tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Dalam Sasaran Strategis ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 (dua) IKU terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dengan rincian:

a. Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini ditargetkan dengan indeks sebesar 100 dan terealisasi sebesar 105,32.

b. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara dan PNBPN Lelang. Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang dicapai KPKNL Banda Aceh pada tahun 2025 dari Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp18.241.513.096,00 dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar Rp18.100.000.000,00. Kemudian PNBPN Piutang Negara mencapai Rp11.415.919,00 dari target sejumlah Rp8.000.000,00. Selanjutnya, PNBPN Lelang mencapai Rp2.415.419.007,00 dari target Rp2.465.000.000,00. Meskipun PNBPN Lelang tidak mencapai target, ketiga pencapaian tersebut secara kolektif menghasilkan Rp20.668.348.022,00 dari target sejumlah Rp20.573.500.000,00 atau capaian realisasi persentase realisasi penerimaan negara sebesar 100,46% dari target 100%.

Sasaran Strategis II: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Terhadap sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal ini KPKNL Banda Aceh memperoleh 2 (dua) IKU yang terdiri dari:

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Realisasi IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dihitung dua komponen, yaitu tingkat optimalisasi pengelolaan aset dan penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset, dengan formula perhitungan pada IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara adalah rata-rata capaian komponen I dan komponen II. Terhadap target sebesar 100%, KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan seluruh target dengan indeks nilai capaian sebesar 101,38%.

b. Persentase realisasi pokok Lelang

KPKNL Banda Aceh menghitung IKU persentase realisasi pokok lelang dari seberapa besar pendapatan pokok lelang yang berasal dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Adapun total target untuk tahun 2025 adalah Rp76.530.000.000,00 namun tercapai dengan nilai sebesar Rp66.417.833.748,00 yakni sebesar 86,79% dari nilai target.

c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Selain itu, terdapat pula IKU persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, yang bertujuan untuk menurunkan outstanding Piutang Negara secara terukur. Target awal tingkat penurunan outstanding piutang negara untuk tahun 2025 adalah Rp720.000.000,00. Adapun pencapaian tahun 2025 adalah sebesar Rp1.042.638.672,46 dari Nilai Outstanding BKPN atau pencapaian realisasi target sebesar 144,81%. Pencapaian ini tidak lepas dari usaha keras KPKNL Banda Aceh terutama Seksi Piutang Negara. Adapun pencapaian penyelesaian ini didapat dari Pelunasan Piutang Negara, Penarikan Piutang Negara dan PSBDT.

Sasaran Strategis III: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa merupakan upaya maksimal untuk memastikan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa terpenuhi serta ketepatan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa. Hal ini dilakukan pula guna memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi. Pada sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) IKU yaitu:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan

Pengukuran atas indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Banda Aceh dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang disampaikan kepada pengguna layanan dengan

menggunakan tautan e-SKPL yang disiapkan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan. Berdasarkan data hasil survei e-SKPL, realisasi indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Banda Aceh mencapai 95,15 dari target 77. Indeks kepuasan yang sangat baik tersebut mencerminkan komitmen peningkatan pelayanan publik yang terus dilaksanakan KPKNL Banda Aceh.

b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Selain itu, terdapat pula IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi yang terdiri dari dua komponen meliputi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jabatan Fungsional Pelelang dan indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara. Guna merealisasikan IKU ini, KPKNL Banda Aceh pada tahun 2025 aktif melakukan kegiatan edukasi dan komunikasi kepada pengguna layanan/mitra lelang dan piutang negara, yang diikuti dengan penyebaran kuesioner kepada para peserta kegiatan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan. Terhadap target indeks yang ditetapkan sebesar 74, diperoleh indeks capaian sebesar 99,21.

Sasaran Strategis IV: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh mengusung 2 (dua) IKU yaitu:

a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa Tanah pada tahun 2025 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. K1: *Clean and Clear* (data yuridis dan fisik lengkap dan tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP).
2. K2: *Not Clean but Clear* (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara), dengan output berupa Sertipikat Hak Pakai/Peta Bidang Tanah (PBT).
3. K3: *Clean But Not Clear/Not Clean and Not Clear*, dengan output berupa Peta Tematik/Berita Acara Pemeriksaan Data Yuridis Dan/Atau Fisik BMN Berupa Tanah Dalam Rangka Pensertipikatan
4. K4: Update dan Validasi Data; untuk bidang tanah sudah bersertipikat namun belum dilakukan update di Master Aset SIMAN, dengan output berupa update data SIMAN dan validasi pada fitur Valserah.

KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan target kategori K1 sebanyak 27 bidang tanah dari target 21 bidang yang harus disertipikat. Selanjutnya, menyelesaikan target kategori K2 sebanyak 2 dari target 2 NUP. Pada kategori K3 berhasil menyelesaikan sebanyak 1338 dari target 1006 NUP dan pada kategori K4 berhasil menyelesaikan sebanyak 63 dari target 27 NUP. Sehingga, memiliki total realisasi sebanyak 1.430 atau sebesar 135,42% dari target 1.056 NUP.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta pelaporan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dan analisis data menggunakan aplikasi portofolio aset. Hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya.

Evaluasi Kinerja BMN merupakan salah satu program unggulan DJKN yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Dengan adanya penerapan portofolio aset tahunan, maka akan diperoleh 3 (tiga) manfaat yakni mengidentifikasi dan mengumumkan K/L yang menggunakan BMN secara kurang optimal; memaksimalkan penggunaan/pemanfaatan BMN berupa lahan/bidang tanah kosong dan/atau *idle*; dan mengidentifikasi tanah dan bangunan pemerintah yang memiliki potensi penggunaan/pemanfaatan alternatif yang lebih baik. Pada tahun 2025, KPKNL Banda Aceh berhasil menghitung evaluasi kinerja BMN sejumlah 928 NUP dari target 835 NUP, serta terdapat 60 rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satuan Kerja, sehingga KPKNL Banda Aceh memiliki total realisasi sebesar 115,57% dari target 877 NUP Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Sasaran Strategis V: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pada sasaran strategis pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, KPKNL Banda Aceh memperoleh 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu

peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan Piutang Negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya/ terselesaikannya Piutang Negara. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah optimal dikelola/diurus berdampak secara pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Dalam hal ini, KPKNL Banda Aceh mendapat target IKU persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara tahun 2025 sebesar 10 BKPN. KPKNL Banda Aceh dapat menyelesaikan sebanyak 13,3 target (setelah pembobotan) sehingga diperoleh pencapaian persentase 133,33%.

b. Tingkat kualitas layanan penilaian

Dalam perhitungan IKU tingkat kualitas layanan penilaian terdapat 3 (tiga) komponen yang dilakukan pengukuran, yaitu Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian yang mengukur rata-rata indeks penyelesaian layanan penilaian, Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian yang mengukur jumlah pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP dan jumlah permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN, serta Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang yang mengukur persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85. Target dari IKU ini yaitu sebesar 70% dengan capaian 108,27% sehingga indeks nilai capaian sebesar 120%.

c. Persentase produktivitas lelang

Pengukuran IKU persentase produktivitas lelang dilakukan terhadap 2 (dua) komponen yaitu persentase rata-rata capaian Lot Lelang Laku (capaian realisasi Lot Lelang Laku secara proporsional jenis lelang dibagi jumlah target Lot Lelang secara proporsional jenis lelang) dan persentase frekuensi lelang tahun 2025. Pencapaian IKU persentase produktivitas lelang tahun 2025 yaitu sebesar 109,37% dari target 80% atau 136,71% jika dihitung dengan indeks capaian tanpa batas.

Sasaran Strategis VI: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Dalam sasaran strategis pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif, KPKNL Banda Aceh memperoleh 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. Indeks kualitas kinerja anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas, yang ditandai dengan penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA, yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Melalui IKU ini dapat dilakukan pengukuran tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu

Belanja Barang dan Belanja Modal serta optimalisasi penyerapan anggaran. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Banda Aceh pada tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%.

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Dalam perhitungan IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa terdapat 3 (tiga) komponen yang dilakukan pengukuran yaitu capaian tingkat penggunaan produk dalam negeri dan capaian indeks tata kelola pengadaan. Terhadap target indeks yang ditetapkan sebesar 100, diperoleh indeks capaian sebesar 120.

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Formula IKU ini diperoleh dari 2 (dua) komponen yaitu pelaksanaan penguatan budaya dan kebintalan Pejabat Administrator di KPKNL Banda Aceh serta realisasi pemenuhan Jam Pelatihan (JP) pada seluruh Pejabat/Pegawai di KPKNL Banda Aceh. Pada tahun 2025 KPKNL Banda Aceh mencapai realisasi 98% dari target 80% atau 122,50%.

Sasaran Strategis VII: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Pada sasaran strategis penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif ini terdapat 2 (dua) IKU terdiri dari:

a. Indeks penanganan permasalahan hukum

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (dengan bobot 80%), dan indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap (dengan bobot 20%). Target dari IKU ini sebesar 100 dengan indeks nilai capaian sebesar 118,01.

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID

Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Target Indeks PPID yaitu 80 dengan realisasi tahunan 115,75 atau tercapai hingga 144,69%.

Sasaran Strategis VIII: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Banda Aceh memperoleh 3 (tiga) IKU, yang masing-masing dirincikan sebagai berikut:

a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan sistem penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Dalam rangka memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, maka diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, yaitu proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. KPKNL Banda Aceh berhasil merealisasikan IKU sebesar 99,53 dari target 80 sehingga indeks nilai capaian sebesar 124,41.

b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen), berupa Persentase Tindak Lanjut *Policy Recommendation*, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Pengawasan Itjen, Persentase Ketepatan Waktu Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen, dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI. IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari Itjen. KPKNL Banda telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi dan dengan demikian, dari target 95,3% telah tercapai realisasi sebesar 100% atau mencapai 104,93% dalam indeksasi.

c. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2025, KPKNL Banda Aceh berhasil mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM yang telah diraih sebelumnya, dengan capaian indeks 120 dari target 100 yang ditetapkan.

3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Target

Secara umum, pencapaian IKU KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 berstatus hijau, dengan hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,27% dari nilai maksimal 120%, sehingga terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2024 yang mencatat perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,69%. Pencapaian yang sangat luar biasa ini merupakan pencapaian dari seluruh pegawai KPKNL Banda Aceh.

Keberhasilan penerimaan PNBPN Piutang Negara yang mampu mencapai Rp11.415.919,00 dari target sebesar Rp8.000.000,00 tidak terlepas dari kemampuan membaca situasi melalui pendekatan persuasif kepada penanggung utang untuk melakukan pembayaran Piutang Negara secara angsuran.

Penilai juga mampu menuntaskan pekerjaannya dengan baik yang ditandai dengan realisasi IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian sebesar 120%. Dengan persentase realisasi yang semakin besar, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan penilaian semakin akuntabel dan profesional

diukur melalui layanan penilaian yang semakin tepat waktu, basis data yang akurat, dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi atau nilai yang optimal.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang terus berkoordinasi dengan kantor pertanahan telah berhasil menoreh prestasi dalam melakukan program sertipikasi BMN seperti sertipikasi terbanyak di tahun 2019 dan penyelesaian sertipikasi tercepat di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2025 KPKNL Banda Aceh berhasil menyelesaikan pensertipikatan 1.430 bidang tanah dengan target kategori yang berbeda-beda.

Sementara itu, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang belum berstatus hijau dengan capaian sebesar 86,79% dari target 100%. Dalam hal tersebut, aspek yang masih belum optimal adalah pokok lelang Pegadaian. Kondisi ini dipengaruhi oleh tren kenaikan harga emas yang sangat signifikan pada tahun 2025, sehingga mendorong banyak nasabah untuk menebus kembali emas yang digadaikan. Emas tersebut kemudian dijual secara sukarela oleh nasabah dan jumlah barang yang masuk ke dalam proses lelang menjadi berkurang.

Seluruh pencapaian dan tantangan tersebut patut diapresiasi dan disyukuri. Walaupun ditengah banyaknya tantangan, termasuk adanya bencana banjir bandang di Provinsi Aceh pada penghujung tahun 2025 namun sebagian besar target mampu dicapai dengan optimal. Semua ini dikarenakan upaya-upaya maksimal yang terus dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh, diantaranya adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk jenis lelang yang belum optimal (lelang pegadaian, eksekusi barang rampasan, dan non eksekusi sukarela).

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud baik berupa Dana maupun Manusia serta Peralatan dan Mesin. Pada tahun 2025, jumlah Sumber Daya Manusia KPKNL Banda Aceh lebih sedikit dari kebutuhan sesuai dengan analisis beban kerja, kendati demikian Sumber Daya Manusia yang ada telah berhasil menyelesaikan target dengan maksimal.

Sumber Daya Manusia juga turut serta mengembangkan inovasi dan dapat memaksimalkan teknologi yang ada dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan tugas, sehingga Sumber Daya Dana mengalami penghematan yang cukup signifikan.

5. Analisis atas Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Berbagai inovasi dirancang oleh Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI) maupun oleh pegawai KPKNL Banda Aceh dalam rangka mempercepat proses layanan dan proses bisnis yang ada sehingga menunjang keberhasilan atas pencapaian kinerja, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. SL'ID (Sistem Layanan Informasi DJKN)

Untuk mendukung pelaksanaan pemberian layanan informasi di lingkungan DJKN serta seluruh unit vertikal, Kantor Pusat DJKN telah meluncurkan aplikasi SL'ID (Sistem Layanan Informasi DJKN) yang terintegrasi dengan CRM Deskpro dan telah diimplementasikan secara nasional termasuk pada KPKNL Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2025.

Aplikasi ini merupakan aplikasi pengelolaan layanan informasi di lingkungan DJKN yang berbasis web dengan alamat www.halodjkn.kemenkeu.go.id/apt dan SSO Kemenkeu sebagai sarana untuk login. Adapun kegunaan SL'ID, yaitu:

- a. perekaman layanan informasi melalui kanal APT, telepon dan *WhatsApp*
- b. survei kepuasan layanan APT
- c. monitoring layanan informasi
- d. pemantauan dan penjaminan kualitas pelayanan
- e. pelaporan.

Kemudian, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat atas kinerja layanan informasi DJKN melalui SL'ID, KPKNL Banda Aceh telah menggunakan aplikasi SL'ID secara optimal. Namun demikian, Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banda Aceh terus melakukan monitoring pemberian layanan informasi baik secara tatap muka melalui APT maupun kanal layanan non tatap muka melalui *Whatsapp* layanan, untuk memastikan seluruh permohonan layanan informasi direspon dengan baik sesuai standar layanan dan direkam melalui SL'ID guna evaluasi berkelanjutan.

b. Saweu Teuku (Layanan Konsultasi Virtual)

Sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh (KPKNL) kepada masyarakat dalam konsep pembangunan berkelanjutan, KPKNL Banda Aceh menghadirkan salah satu inovasi berupa layanan konsultasi virtual melalui Saweu Teuku.

Saweu Teuku merupakan layanan konsultasi berbasis daring yang bertujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan memperoleh informasi dan konsultasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh menyediakan Layanan konsultasi virtual Saweu Teuku setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Terbuka untuk seluruh layanan yang ada pada KPKNL, mulai dari pengelolaan kekayaan negara, penilaian, lelang, hingga pengurusan piutang negara.

c. **Kanal Digital Informasi Terpadu**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh, penyediaan informasi layanan yang akurat, mudah dipahami, dan didukung oleh komunikasi yang efektif diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan organisasi dalam menyediakan informasi prosedur layanan yang praktis, seragam, dan mudah diakses oleh pengguna layanan, KPKNL Banda Aceh menghadirkan Kanal Digital Informasi Terpadu. Kanal digital ini berfungsi sebagai media terintegrasi yang memuat *Frequently Asked Questions* (FAQ) dan dapat diakses oleh pengguna layanan melalui media sosial resmi KPKNL Banda Aceh serta pemindaian barcode yang tersedia pada loket Area Pelayanan Terpadu (APT). Kehadiran kanal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi layanan secara cepat, jelas, dan efektif.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui tabel perbandingan data layanan sebelum dan sesudah implementasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kanal digital informasi terpadu KPKNL Banda Aceh memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik. Integrasi informasi prosedur layanan dalam satu kanal resmi memungkinkan pengguna layanan memperoleh informasi secara mandiri, jelas, dan seragam sehingga terjadi penurunan intensitas pertanyaan berulang serta penurunan rata-rata waktu layanan.

6. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi

Rencana aksi tahun 2025 akan dilakukan untuk mendukung rencana aksi terdahulu dan menjawab kembali tantangan dan target yang baru di tahun ini. KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja, yaitu:

- a. Sinergi dan koordinasi dengan satuan kerja pengguna barang dalam rangka identifikasi potensi pemanfaatan BMN, optimalisasi penggunaan BMN, serta memonitoring tindak lanjut pengelolaan BMN yang telah terbit.
- b. Sinergi dan koordinasi dengan satuan koordinator wilayah dan kantor pertanahan dalam menyusun rencana kerja bersama guna mendukung percepatan sertifikasi BMN berupa Tanah.
- c. Melakukan koordinasi rutin dengan *stakeholders* meliputi Perbankan, UMKM, dan Pemerintah Daerah terkait prosedur dan persyaratan lelang, dan melakukan penggalan potensi Lelang.
- d. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) Versi 2 kepada *stakeholders* Lelang.
- e. Melaksanakan penagihan langsung kepada debitur dan meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS dan PSBDT).
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dan kelompok jabatan fungsional melalui berbagai cara diantaranya diklat dan *sharing session*.
- g. Monitoring dan evaluasi peningkatan *hard competency* pegawai.

- h. Selain itu, tentunya juga melanjutkan rencana aksi tahun sebelumnya yang telah dianalisis dengan baik dan disesuaikan terhadap setiap indikator kinerja utama dan yang ada pada KPKNL Banda Aceh.

7. Rencana Aksi

Rencana aksi tahun 2026 akan dilakukan untuk mendukung rencana aksi terdahulu dan menjawab kembali tantangan dan target yang baru di tahun ini. KPKNL Banda Aceh telah menyusun beberapa rencana aksi untuk pencapaian sasaran kinerja, yaitu:

- a. KPKNL Banda Aceh terus-menerus mengupayakan perbaikan, peningkatan kinerja dan layanan kepada *stakeholders* untuk mencapai indeks kepuasan pengguna layanan yang optimal.
- b. Sinergi dan koordinasi dengan satuan kerja pengguna barang dalam rangka identifikasi potensi optimalisasi penggunaan BMN, pengelolaan BMN, serta memonitoring tindak lanjut pengelolaan BMN yang telah terbit.
- c. Sinergi dan koordinasi dengan satuan koordinator wilayah dan kantor pertanahan dalam menyusun rencana kerja bersama guna mendukung percepatan sertifikasi BMN berupa Tanah untuk masing-masing kategori.
- d. Sosialisasi dan bimbingan teknis dengan *stakeholders* Lelang meliputi Perbankan, UMKM, Pemerintah Daerah, dan Pegadaian terkait prosedur dan persyaratan lelang, implementasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) Versi 2, dan melakukan penggalan potensi Lelang.
- e. Melaksanakan penagihan langsung kepada debitur dan meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS dan PSBDT).
- f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai dan kelompok jabatan fungsional melalui berbagai cara diantaranya diklat dan *sharing session*.
- g. Monitoring dan evaluasi peningkatan *hard competency* pegawai.
- h. Selain itu, tentunya juga melanjutkan rencana aksi tahun sebelumnya yang telah dianalisis dengan baik dan disesuaikan terhadap setiap indikator kinerja utama dan yang ada pada KPKNL Banda Aceh.

B. Kinerja Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2025, KPKNL Banda Aceh berhasil meraih prestasi sebagai satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A I Banda Aceh dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dengan kinerja sangat baik, yang ditunjukkan melalui capaian nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100 (sempurna) pada Semester I dan Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan IKPA Tahun 2025



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Dalam upaya mencapai target tersebut, KPKNL Banda Aceh menunjukkan komitmen yang tinggi melalui sinergi yang solid di antara seluruh unit kerja. Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Banda Aceh tahun anggaran 2025 mencapai 120% dari target sebesar 100%. Optimalisasi pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal, meskipun terdapat perubahan target yang menjadi bagian dari proses bisnis utama DJKN, dengan tujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Sasaran Strategis. Selain itu, berbagai penyesuaian pagu anggaran juga dilakukan oleh KPKNL Banda Aceh guna memastikan anggaran yang tersedia mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif.

Dana yang dialokasikan pada DIPA KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam SP DIPA Nomor 015.09.2.537827/2025 tanggal 2 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.087.811.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp3.782.729.000,00, sehingga dana yang tersedia untuk direalisasikan adalah sebesar Rp2.305.082.000,00.

Selanjutnya, realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp2.187.565.367,00, yang setara dengan 35,93% dari total anggaran. Namun, karena terdapat anggaran yang diblokir, persentase realisasi anggaran riil KPKNL Banda Aceh mencapai 94,90%, realisasi anggaran ini mencerminkan optimalisasi penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Adapun realisasi anggaran sebesar 94,90% tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Alokasi	Blokir	Dapat Direalisasikan	Realisasi	%
2.227.834.000	293.777.000	1.934.057.000	1.836.347.367	94,94

2. Belanja Modal

Alokasi	Blokir	Dapat Direalisasikan	Realisasi	%
3.859.977.000	3.488.952.000	371.025.000	351.218.000	94,66

3. Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat belanja pegawai di KPKNL Banda Aceh, sejalan dengan pelaksanaan sentralisasi pengelolaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 bagi seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel 3. 11 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan I 2025
A. Nilai IKPA (Bobot 100%)		100.00
1	Revisi DIPA	100.00
2	Deviasi Hal III DIPA	100.00
3	Belanja Kontraktual	-
4	Pengelolaan UP dan TUP	100.00
5	Dispensasi SPM	-
6	Penyerapan Anggaran	100.00
7	Penyelesaian Tagihan	-
8	Capaian Output	100.00
B. Nilai SMART (Bobot 0%)		
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan I 2025		100.00
Indeks Capaian IKU IKA s.d. Triwulan I 2025		120.00

Tabel 3. 12 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan II 2025
A. Nilai IKPA (Bobot 100%)		100.00
1	Revisi DIPA	100.00
2	Deviasi Hal III DIPA	100.00
3	Belanja Kontraktual	-
4	Pengelolaan UP dan TUP	100.00
5	Dispensasi SPM	-
6	Penyerapan Anggaran	100.00
7	Penyelesaian Tagihan	-
8	Capaian Output	100.00
B. Nilai SMART (Bobot 0%)		
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan II 2025		100.00
Indeks Capaian IKU IKA s.d. Triwulan II 2025		120.00

Tabel 3. 13 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan III Tahun Anggaran 2025

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan III 2025
A. Nilai IKPA (Bobot 100%)		100.00
1	Revisi DIPA	100.00
2	Deviasi Hal III DIPA	100.00
3	Belanja Kontraktual	-
4	Pengelolaan UP dan TUP	100.00
5	Dispensasi SPM	-
6	Penyerapan Anggaran	100.00
7	Penyelesaian Tagihan	-
8	Capaian Output	100.00
B. Nilai SMART (Bobot 0%)		
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan II 2025		100.00
Indeks Capaian IKU IKA s.d. Triwulan II 2025		120.00

Tabel 3. 14 Laporan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran KPKNL Banda Aceh Triwulan IV Tahun Anggaran 2025

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan IV 2025
A. Nilai IKPA		99.82
1	Revisi DIPA	100.00
2	Deviasi Hal III DIPA	100.00
3	Belanja Kontraktual	-
4	Pengelolaan UP dan TUP	98.56
5	Dispensasi SPM	-
6	Penyerapan Anggaran	100.00
7	Penyelesaian Tagihan	-
8	Capaian Output	100.00
B. Nilai SMART (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran)		99.00
1	Capaian RO (75%)	100.00
2	Penggunaan SBK (10%)	90.00
3	Efisiensi SBK (15%)	100.00
Nilai Capaian IKU IKA / NKA s.d. Triwulan IV 2025 (50% IKPA + 50% SMART)		99.41
Indeks Capaian IKU IKA/ NKA s.d. Triwulan IV 2025		120.00

Tabel 3. 15 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	537827 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH	PAGU	0	2,227,834,000	3,859,977,000	0	0	0	0	0	0	6,087,811,000
		REALISASI	0.00%	1,836,347,367 (82.43%)	351,218,000 (9.10%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,187,565,367 (35.93%)
		SISA	0	391,486,633	3,508,759,000	0	0	0	0	0	0	3,900,245,633
GRAND TOTAL		PAGU	0	2,227,834,000	3,859,977,000	0	0	0	0	0	0	6,087,811,000
		REALISASI	(0.00%)	1,836,347,367 (82.43%)	351,218,000 (9.10%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,187,565,367 (35.93%)
		SISA	0	391,486,633	3,508,759,000	0	0	0	0	0	0	3,900,245,633

*realisasi tidak mencerminkan kondisi riil, karena perhitungannya mencakup anggaran yang diblokir, breakdown realisasi riil dijelaskan di atas.

Tabel 3. 16 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Kegiatan KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4700 Legislasi dan Litigasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	31,488,000 29,377,136 (93.30%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	31,488,000 29,377,136 (93.30%)
		SISA	0	2,110,864	0	0	0	0	0	0	0	2,110,864
2	4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,512,542,000 1,357,678,567 (89.76%)	3,859,977,000 351,218,000 (9.10%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,372,519,000 1,708,896,567 (31.81%)
		SISA	0	154,863,433	3,508,759,000	0	0	0	0	0	0	3,663,622,433
3	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	PAGU REALISASI	0 0.00%	28,436,000 13,160,000 (46.28%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	28,436,000 13,160,000 (46.28%)
		SISA	0	15,276,000	0	0	0	0	0	0	0	15,276,000
4	4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	PAGU REALISASI	0 0.00%	31,512,000 12,220,508 (38.78%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	31,512,000 12,220,508 (38.78%)
		SISA	0	19,291,492	0	0	0	0	0	0	0	19,291,492
5	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	71,225,000 3,794,000 (5.33%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	71,225,000 3,794,000 (5.33%)
		SISA	0	67,431,000	0	0	0	0	0	0	0	67,431,000
6	4798 Pengelolaan Aset	PAGU REALISASI	0 0.00%	552,631,000 420,117,156 (76.02%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	552,631,000 420,117,156 (76.02%)
		SISA	0	132,513,844	0	0	0	0	0	0	0	132,513,844
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	2,227,834,000 1,836,347,367 (82.43%)	3,859,977,000 351,218,000 (9.10%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	6,087,811,000 2,187,565,367 (35.93%)
		SISA	0	391,486,633	3,508,759,000	0	0	0	0	0	0	3,900,245,633

*realisasi tidak mencerminkan kondisi riil, karena perhitungannya mencakup anggaran yang diblokir, breakdown realisasi riil dijelaskan di atas.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan sangat baik dan mencatatkan peningkatan jumlah NKO dari tahun 2024. Seluruh pencapaian IKU pada tahun 2025 memenuhi target bahkan pada beberapa IKU melebihi target, kecuali pada IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang yang mencapai nilai 86,79% dari target maksimal 100%.

Target yang terdiri atas 8 Sasaran Strategis dengan total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Banda Aceh Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik, sebagian besar melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 112,27% dari nilai maksimal 120%. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan terus menerus menuju kesempurnaan.

FAKTOR PENDUKUNG

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama dari satuan kerja yang semakin menyadari pentingnya pengelolaan Aset Negara;
2. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. Hubungan yang telah terjalin baik dengan para stakeholder;
4. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang semakin baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu dari seluruh pegawai.

KENDALA

Walau demikian, terdapat kendala-kendala yang dihadapi KPKNL Banda Aceh dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Masih besarnya saldo aset eks BRR dan lokasi yang tersebar;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, salah satunya disebabkan oleh banyaknya

- peraturan/ketentuan yang baru. Hal ini menyebabkan masih adanya perbedaan pemahaman dari stakeholder dalam menafsirkan peraturan terkait tugas dan fungsi KPKNL;
3. Keterbatasan dukungan anggaran dan SDM dalam pengelolaan BMN ditingkat satuan kerja;
 4. Terdapat satuan kerja dan *stakeholders* yang belum mampu memberdayakan secara maksimal teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi di DJKN untuk mendukung proses bisnis dan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SIMAN V2 dan Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) V2 turut menjadi tantangan dikarenakan perlunya adaptasi oleh *stakeholders*;
 5. Terhadap lelang eksekusi hak tanggungan masih dalam proses adaptasi dengan penerapan Qanun Aceh terkait Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan dampak signifikan terhadap kuantitas permohonan lelang. Selain itu, belum terdapat variasi pembiayaan untuk pembelian lelang dan timbulnya beberapa perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang baik non TGR ataupun TGR yang mengakibatkan penurunan peminat terhadap objek lelang;
 6. Terhadap realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang Pegadaian, terdapat tren kenaikan harga emas yang sangat signifikan pada tahun 2025, sehingga mendorong banyak nasabah untuk menebus kembali emas yang digadaikan. Emas tersebut kemudian dijual secara sukarela oleh nasabah dan jumlah barang yang masuk ke dalam proses lelang menjadi berkurang;
 7. Dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) juga memiliki beberapa tantangan dan permasalahan seperti wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang sangat luas dan sulit untuk ditempuh dengan perjalanan darat, beberapa aplikasi masih kurang mendukung percepatan proses pengelolaan, dan lambatnya proses pengelolaan diakibatkan oleh kompetensi *user* pengguna yang lemah juga penyampaian dokumen oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan;
 8. Tantangan dalam pengurusan piutang negara meliputi seringnya Debitur tidak mengakui utang, sulitnya penagihan dengan alasan keberadaan Debitur tidak dapat diketahui, dan barang jaminan yang tidak dikuasai oleh pengelola piutang (PUPN);
 9. Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

B. Saran

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Banda Aceh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Banda Aceh agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Secara lebih spesifik, saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi target capaian KPKNL Banda Aceh adalah dengan menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerjasama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima dan professional kepada *stakeholders* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN serta mengutilisasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Terus melanjutkan proses penyelesaian pengelolaan BMN eks BRR NAD-Nias;
6. Meningkatkan penggalian potensi lelang, lelang pegadaian dan lelang sukarela;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi;
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholders* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan dan implementasi sistem informasi terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Banda Aceh secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara, serta sertifikasi BMN.

Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan menyeluruh kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh. Selanjutnya, Laporan

Kinerja agar dapat digunakan untuk merespon setiap perkembangan tuntutan *stakeholders* serta menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.



Lampiran

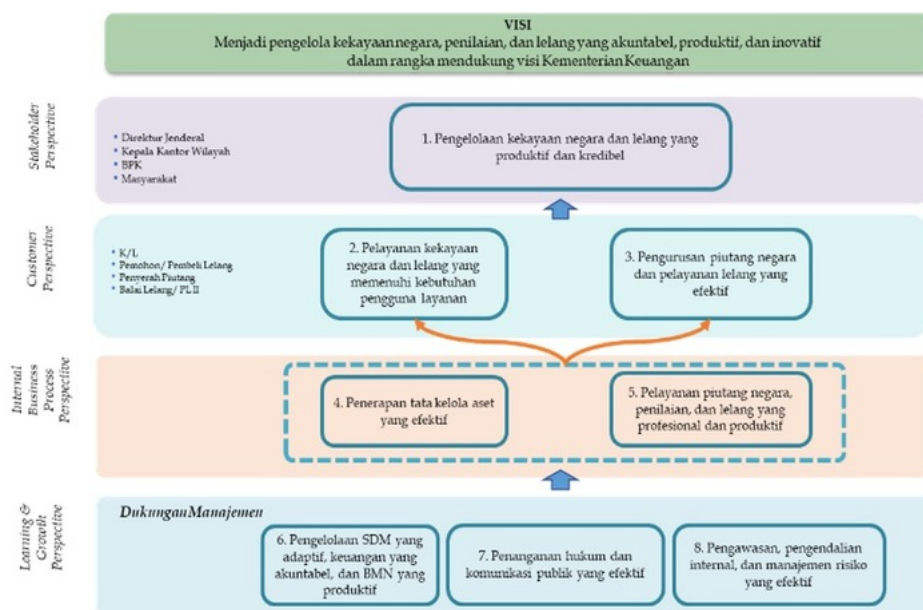


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.01/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANDA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANDA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp120 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp37 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp892,331,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp78,010,000
2. Pengelolaan Aset	Rp814,321,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp5,449,788,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp31,488,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp5,360,848,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp30,588,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp26,864,000

Banda Aceh, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANDA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp120 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp37 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Banda Aceh, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Banda Aceh, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Meynar Dwi Anggraeny		NAMA	Nofiansyah
NIP	19850511 200901 2 005		NIP	19741111 199403 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,7 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp120 Jt)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp37 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Banda Aceh, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Meynar Dwi Anggraeny
19850511 200901 2 005



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah
19741111 199403 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19,7 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp120 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp37 M)



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Banda Aceh, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Meynar Dwi Anggraeny

19850511 200901 2 005

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Lampiran II

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja (berdasarkan surat KemenPAN RB B/37/AA.01/2025)

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1	SS 1.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						
	<i>Indeks integritas</i>				100	105,32	105,32
	<i>Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang</i>				100%	100,46%	100,46
	SS 1.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	<i>Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara</i>				100%	100,45%	100,45
	<i>Persentase realisasi pokok Lelang</i>				100%	86,79%	86,79
	<i>Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara</i>				100%	144,81%	144,81
	SS 1.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
	<i>Indeks kepuasan pengguna layanan</i>				77	99,40	129
	<i>Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi</i>				74	96	129
	SS 1.4 Penerapan tata kelola asset yang efektif						
	<i>Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan</i>				100%	135,42%	135,42
	<i>Persentase evaluasi kinerja BMN</i>				100%	115,57%	115,57
	SS 1.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	<i>Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara</i>				100%	133%	133
	<i>Tingkat kualitas layanan penilaian</i>				70%	109,28%	156
	<i>Persentase produktivitas lelang</i>				80%	109,37%	136
	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	506.460.000	423.911.156	83,70			
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi						
	Sosialisasi dan Diseminasi						
	<i>Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara</i>	2.152.000	990.000	46			
	<i>Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara</i>	3.937.000	2.804.000	71,22			
	<i>Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang</i>	576.000	0	0			
	Pengelolaan Aset						
	Peraturan lainnya						

	<i>Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara</i>	182.454.000	138.790.811	76,07			
	<i>Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara</i>	72.402.000	68.199.962	92,40			
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan						
	<i>Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset</i>	76.860.000	78.855.500	92,19			
	Pelayanan Publik Lainnya						
	<i>Risalah Lelang</i>	56.220.000	54.209.472	96,42			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	<i>Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara</i>	26.284.000	11.533.692	43,88			
	<i>Rekomendasi Hasil Penilaian</i>	15.180.000	12.195.000	80,34			
	<i>Penggalian Potensi Lelang</i>	18.893.000	17.765.400	94,03			
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	<i>Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)</i>						
2	SS 2.1 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
	<i>Indeks kualitas kinerja anggaran</i>				100	120	120
	<i>Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa</i>				100	120	120
	<i>Persentase pengembangan kompetensi pegawai</i>				80%	98%	122,5
	SS 2.2 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
	<i>Indeks penanganan permasalahan hukum</i>				100	118	118
	<i>Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)</i>				80		
	SS 2.3 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
	<i>Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko</i>				80	116	145
	<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>				95,3%	100%	104,93
	<i>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM</i>				100	120	120
	Dukungan Manajemen	1.798.622.000	1.763.654.211	98,06			
	Legislasi dan Litigasi						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	<i>Layanan Bantuan Hukum</i>	31.488.000	29.377.136	93,30			
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum						
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
	<i>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	50.000.000	30.255.000	60,51			
	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	<i>Kerumahtanggaan</i>	169.108.000	160.713.778	95,04			
	<i>Layanan Perkantoran</i>	1.200.637.000	1.196.964.789	99,69			
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
	<i>Peralatan Fasilitas Perkantoran</i>	321.025.000	320.963.000	99,98			

	<i>Gedung/Bangunan</i>	0	0	0			
	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik						
	Komunikasi Publik						
	<i>Kehumasan</i>	13.628.000	13.160.000	96,57			
	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal						
	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	<i>Rekomendasi Kepatuhan Internal</i>	12.736.000	12.220.508	95,95			
	TOTAL ANGGARAN	2.305.082.000	2.187.565.367	94,90			